

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
BERDASARKAN PERLINDUNGAN KELESTARIAN KELAUTAN**

TESIS

Oleh:

MARCELLUS JAYAWIBAWA

202220252001



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Nama Mahasiswa : Marcellus Jayawibawa

NIM : 202220252001

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

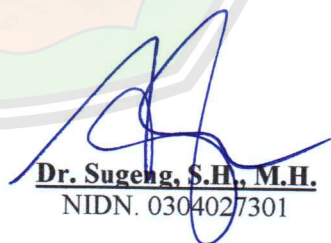
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

PEMBIMBING I



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

PEMBIMBING II



Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023
Berdasarkan Perlindungan Kelestarian Kelautan

Nama Mahasiswa : Marcellus Jayawibawa

Nomor Pokok Mahasiswa : 202220252001

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juli 2024

Bekasi, Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 8976950022

Penguji I : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 8976950022

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellus Jayawibawa
NPM : 202220252001
TTL : Jakarta, 21 Maret 1978
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Laut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perlindungan Kelestarian Kelautan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Marcellus Jayawibawa

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marcellus Jayawibawa
NPM : 202220252001
TTL : Jakarta, 21 Maret 1978
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PERLINDUNGAN KELESTARIAN KELAUTAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Marcellus Jayawibawa

Abstrak

Pasal 56 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan perintah untuk melakukan perlindungan lingkungan laut. Turunan dari norma tersebut, melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut. Faktanya substansi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 bertolak belakang dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kesenjangan ini menimbulkan permasalahan hukum dalam perlindungan lingkungan laut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan? Kedua, bagaimana implementasi terhadap norma hasil sedimentasi di laut yang bertentangan dengan prinsip perlindungan kelestarian lingkungan kelautan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengedepankan hukum sebagai wujud dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menyatakan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 56 UU Kelautan dan bahkan UUD NRI Tahun 1945, telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Terjadi ketidakpastian hukum antara kebijakan pemerintah yang mengarah perlindungan dan kepastian hukum atau pada aspek ekonomi. Kontraproduktif tersebut terjadi dikarenakan negara kurang tegas melakukan implementasi norma pasal 56 UU Kelautan dalam PP Nomor 26 Tahun 2023. Selain itu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP Nomor 26 Tahun 2023 tidak mengatur sanksi pidana terkait turut serta penambangan pasir laut yang berdasarkan pelestarian lingkungan laut, hanya mengatur sanksi administrasi saja. Hal inilah yang menyebabkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 205/Pid.Sus/2020/PN.Tbk tidak memberikan perlindungan hukum bahkan terjadi diskriminasi pemanfaatan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut. Bahkan blum ada perlindungan hukum pemanfaatan pasir laut oleh masyarakat sekitar baik masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat. Pertentangan substansi norma dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 terhadap UU Kelautan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap PP Nomor 26 Tahun 2023 yang menyesuaikan dengan substansi UU Kelautan. Substansi yang dimaksud adalah mengenai tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Selain itu juga perlu dilakukan. Selain itu juga perlu dilakukan penerapan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang mempertimbangkan perlindungan masyarakat lokal maupun masyarakat adat yang memang bergantung pada sumber daya laut. Sudah seharusnya tidak ada diskriminasi perlindungan warga negara dalam penerapan norma hasil sementasi laut.

Katakunci: Kelestarian Kelautan, Pengelolaan Sumber Daya Laut, Kepastian Hukum

Abstract

Article 56 of Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs provides orders to protect the marine environment. A derivative of this norm, gave birth to Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea. In fact, the substance of Government Regulation Number 26 of 2023 is contradictory to Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs. This gap raises legal problems in protecting the marine environment. The formulation of the problem in this research is: first, what is the position of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea in terms of Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs? Second, how is the implementation of norms resulting from sedimentation in the sea which are contrary to the principle of protecting the sustainability of the marine environment? The research method used is normative juridical research. Normative juridical research puts forward law as a form of statutory regulations established by authorized institutions. Meanwhile, the approaches used are the statutory approach and the case approach. The research results state that PP Number 26 of 2023 is contrary to Article 56 of the Maritime Affairs Law and even the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which has resulted in a lack of legal certainty. There is legal uncertainty between government policies that lead to protection and legal certainty or economic aspects. This counterproductive occurs because the state is less firm in implementing the norms of Article 56 of the Marine Law in PP Number 26 of 2023. Apart from that, Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs and PP Number 26 of 2023 do not regulate criminal sanctions related to participating in sea sand mining based on conservation. marine environment, only regulates administrative sanctions. This is what causes the Batam District Court Decision Number 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm and the Tanjung Balai Karimun District Court Decision Number 205/Pid.Sus/2020/PN Tbk to not provide legal protection and there is even discrimination in the use of marine sedimentation products in the form of sea sand. In fact, there is no legal protection for the use of sea sand by surrounding communities, both local communities and customary law communities. There is a conflict between the substance of norms in PP Number 26 of 2023 and the Maritime Law, so it is necessary to make changes to PP Number 26 of 2023 to adapt it to the substance of the Maritime Law. The substance in question is regarding the state's responsibility for protecting and preserving the marine environment. Apart from that, it also needs to be done. Apart from that, it is also necessary to implement management of marine sedimentation results that takes into account the protection of local communities and indigenous communities who depend on marine resources. There should be no discrimination in the protection of citizens in the application of marine cementation product norms.

Keywords: *Marine Sustainability, Marine Resource Management, Legal Certainty*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas khadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PERLINDUNGAN KELESTARIAN KELAUTAN”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata dua (S2) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak sepanjang proses penyusunannya. Karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Hotma Pardomuan Sibuea, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih sudah mengingatkan untuk bisa selesai tiga semester.
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama tesis saya, Terima kasih atas bimbingan, saran dan semangat yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.
6. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua tesis saya, Terima kasih atas motivasi yang diberikan serta tidak kenal lelah mengingatkan untuk bisa menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.

7. Untuk Christianus Hakeng, Ayah saya yang sangat saya cintai serta Keluarga Besar Hakeng yang selalu memberikan dukungan berupa doa agar tetap semangat dalam kuliah dan menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Paulina Lince, Almarhum Ibu saya yang selalu menjadi inspirasi tentang pentingnya Pendidikan bagi anak-anaknya.
9. Kepada Anak-Anak saya terkasih Angelica Judith Micheldi dan Gregorius Chrisan Hakeng yang selalu menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan semua pekerjaan dan pendidikan saya.
10. Kepada Prof. Tubagus Achmad Darajat dan Keluarga yang telah menjadi inspirasi dan memberikan bimbingan dalam banyak hal selama masa kuliah.
11. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan dan proses penyusunan tesis ini.
12. Kepada Atasan dan rekan-rekan kerja saya di PT. Pertamina Trans Kontinental yang telah memberi dukungan serta ruang yang cukup bagi saya dalam menimba Ilmu dan menyelesaikan Pendidikan saya ini.
13. Kepada teman-teman sekelas yang telah menjadi sumber berbagi ilmu dan memberikan bantuan berharga dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang maritim serta pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan kelautan kedepannya.

Jakarta, 20 Juli 2024

Marcellus Jayawibawa
202220252001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis.....	11
1.6. Kerangka Konseptual	18
1.7. Kerangka Pemikiran.....	19
1.8. Penelitian Terdahulu.....	21
1.9. Metode Penelitian.....	26
1.10. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1. Teori Negara Hukum.....	31
2.2. Teori Kepastian Hukum	38
2.3. Teori Perlindungan Hukum	43
BAB III HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN LAUT	46
3.1. Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut	46
3.1.1. Pengelolaan Sumber Daya Laut Berdasarkan Prinsip Keberlanjutan	46

3.1.2.	Pengertian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut	47
3.1.3.	Pelindungan Laut Sebagai Dasar Pengelolaan Sumber Daya Laut... 48	
3.2.	Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Sebagai Bagian Pengelolaan Laut ...50	
3.2.1.	Pengertian Hasil Sedimentasi Laut	50
3.2.2.	Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut	51
3.2.3.	Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut Berorientasi Aspek Ekonomi ... 53	
3.3.	Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Laut Yang Bertentangan UU Kelautan...55	
3.3.1.	Pasal 56 UU Kelautan Sebagai Dasar Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut 55	
3.3.2.	Pelindungan dan Pelestarian Laut Sebagai Dasar Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.....	57
BAB IV IMPLEMENTASI PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PELINDUNGAN DAN PELESTARIAN LAUT		63
4.1.	Norma Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut ditinjau dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	63
4.2.	Implementasi Norma Hasil Sedimentasi Di Laut Yang Bertentangan Dengan Prinsip Perlindungan Kelestarian Lingkungan Kelautan.....	81
BAB V PENUTUP.....		119
5.1.	Kesimpulan.....	119
5.2.	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		122
A.	Buku.....	122
B.	Jurnal.....	125

C. Peraturan Hukum dan Putusan Pengadilan	130
D. Internet	130

